

MEMPERTIMBANGKAN ETIKA KEUTAMAAN ARISTOTELES DI TENGAH MARAKNYA PRAKTIK “JOKI KARYA ILMIAH” DI DUNIA PENDIDIKAN INDONESIA

Oleh: Alberto Indrabayu Ta Tonggo
(Mahasiswa Semester VIII IFTK Ledalero)

Abstrak: *Harian Kompas, Jumat (11/02/2023) menurunkan laporan miris tentang maraknya keterlibatan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), mahasiswa, dosen, calon guru besar, hingga petinggi kampus, dalam praktik joki karya ilmiah. Maraknya praktik perjokian ini sesungguhnya telah mengkhianati, merusak, membohongi, profesionalitas dan purifikasi ilmiah dunia pendidikan Indonesia. Praktik perjokian telah melumpuhkan moralitas akademik dan menggantikannya dengan budaya serba instan. Berhadapan dengan problem ini, penulis melihat perlu adanya gagasan etika keutamaan Aristoteles, sebagai sebuah bahan pertimbangan untuk mendekati, masuk ke dalam dunia pendidikan Indonesia yang tengah berada dalam situasi miris ini. Etika keutamaan Aristoteles memungkinkan setiap individu di dalam dunia pendidikan, mampu memiliki watak keutamaannya untuk menangkal setiap problem yang menghalangi perkembangan pendidikan di Indonesia, termasuk problem perjokian ini.*

Kata Kunci: *Joki Karya Ilmiah, Etika Keutamaan Aristoteles, Moral Akademik, Pendidikan Indonesia.*

I. Pendahuluan

Tim investigasi *Kompas*, Jumat (11/02/2023), menampilkan empat berita miris tentang maraknya “praktik joki karya ilmiah”¹ di dunia pendidikan Indonesia. Keempat berita itu, bertajuk “Usaha Perjokian Merajalela Bagai Pabrik-Karya Ilmiah”, “Perjokian Tergoda Jalan Pintas Gadaikan Integritas”, “Kepakaran Diperjualbelikan Bebas”, “Fenomena Buruk yang Diabaikan”, dan Karya Joki Sulit Diidentifikasi”².

Sebagaimana telaah tim investigasi *Kompas*, praktik joki karya ilmiah itu, tampil bak industri perdagangan. Di dalam industri perdagangan tersebut, hadir penyedia jasa joki, makelar, dan pengguna jasa joki yang kebanyakan adalah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), mahasiswa, dosen, calon guru besar, hingga petinggi kampus.

Para penyedia jasa joki biasanya mempromosikan jasa mereka lewat media sosial, *platform* belanja daring (*e-commerce*), dan selebaran atau poster-poster yang dipajang di jalanan-jalanan kota. Mereka berbadan hukum, terorganisir, dan masif.

Para pengguna jasa joki memanfaatkan para penyedia jasa joki ini, untuk memuluskan sejumlah tuntutan pengerjaan karya ilmiah yang menjadi kewajiban mereka dalam sistem pendidikan yangigeluti. Mereka kadang meminta bantuan makelar untuk mempermudah mereka

-
- 1 Kata joki berkonotasi “pengalihan beban atau jalan pintas pragmatis yang ditempuh”. Dalam hubungannya dengan praktik perjokian karya ilmiah atau yang dikenal secara global sebagai “*contract cheating*” – istilah yang diperkenalkan oleh peneliti Inggris, Thomas Lancaster dan Robert Clarke dalam studi tahun 2006 – kata joki dimaknai sebagai tindakan seorang individu atau kelompok individu yang menyewa pihak ketiga untuk menyelesaikan tugas akademik. Haekal Al Asyari, “Maraknya ‘Joki’ di Dunia Pendidikan Mengancam Integritas Akademik Mahasiswa Indonesia”, dalam *The Conversation*, <https://theconversation.com/maraknya-joki-di-dunia-pendidikan-mengancam-integritas-akademik-mahasiswa-indonesia>, diakses pada 5 Februari 2023.
 - 2 Tim Investigasi Harian Kompas, “Usaha Perjokian Merajalela Bagai Pabrik-Karya Ilmiah, Perjokian Tergoda Jalan Pintas Gadaikan Integritas, Kepakaran Diperjualbelikan Bebas, Fenomena Buruk yang Diabaikan, dan Karya Joki Sulit Diidentifikasi”. *Kompas*, 11 Februari 2023, hlm. 1.

terhubung dengan penyedia jasa joki. Tentu saja, bayaran untuk penyedia jasa joki ini, sangat tergantung dari kategori model karya tulis yang diinginkan oleh pengguna jasa joki; mulai dari tugas SMA, *paper*, skripsi, tesis, disertai, hingga naskah ilmiah untuk penerbitan di jurnal ilmiah sebagai syarat menjadi guru besar.

Sebagaimana disebut Hyronimus Rhiti, dalam opininya bertajuk “Perjokian, Antara Beban dan Status”, Praktik joki karya ilmiah menggema dalam simbiosis mutualisme (kerja sama yang menguntungkan) antara para akademisi sebagai pengguna jasa joki dan para joki. Di satu pihak, para akademisi butuh karya ilmiah demi memenuhi syarat, predikat, dan status “insan paling atau sok ilmiah”. Di pihak lain, para joki juga membutuhkan penghasilan atau tambahan pundi-pundi. Dengan ini, terjadilah gotong royong yang mesra di antara kedua kelompok tersebut. Pada akhirnya, batas yang tegas antara olah akal budi, pengalaman, moral akademik di dunia pendidikan dan praktik perjokian yang memproduksi hasrat mengambil jalan pintas, menjadi kabur.³

Dengan adanya praktik ini, asumsi bahwa dunia pendidikan Indonesia sebagai pemenuhan dan penjaga moral dan intelektual masyarakat menjadi runtuh seketika, ketika hal yang sangat substantif dalam dunia pendidikan itu tidak dijaga kewibawaannya (muruah). Praktik perjokian telah melumpuhkan moralitas akademik dan menggantikannya dengan budaya serba instan. Dengan ini, sistem pendidikan di Indonesia boleh dikatakan berjalan dalam spirit prosedural semata: “asalkan proses berjalan baik, tanpa melihat problem mendasar-perjokian yang tengah mengusik muruah dunia pendidikan”.

Sampai pada titik ini, patutlah diajukan pertanyaan: Apakah keutamaan moral dunia pendidikan Indonesia dan akademisi yang hidup di dalamnya sangat mudah dimangsa oleh problem-problem sosial, termasuk bisnis perjokian ini? Di manakah kekukuhan muruah integritas dunia pendidikan Indonesia? Adakah upaya yang bisa dilakukan untuk kembali membangun moral pendidikan di Indonesia?

3 Hyronimus Rhiti, “Perjokian, antara Beban dan Status”, *Kompas*, 14 Februari 2023, hlm. 6.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penulis mencoba menelusuri kembali pandangan Aristoteles, seorang filsuf Yunani Kuno, tentang etika keutamaan. Etika keutamaan Aristoteles berkuat pada pertanyaan “manusia macam apakah aku harus menjadi” (*the ethics of being*).⁴ Etika keutamaan Aristoteles sangat menekankan *hexis*, disposisi dan kualitas⁵ yang mesti dimiliki oleh seorang individu, untuk memungkinkan dirinya memiliki watak-nya: “menjadi manusia yang berkeutamaan”.

Tesis dasar penulis dalam tulisan ini, adalah bahwa pandangan etika keutamaan Aristoteles perlu dipertimbangkan untuk dihidupi di dunia pendidikan Indonesia. Hemat penulis, para pendidik dan peserta didik mesti memiliki watak keutamaannya, agar mampu menangkal setiap problem-problem sosial, termasuk bisnis perjokian ini, yang dapat menghancurkan muruah integritas pendidikan dan masa depan bangsa Indonesia.

Keseluruhan tulisan ini akan dibagi ke dalam lima bagian. *Pertama*, pendahuluan. *Kedua*, menilik pandangan etika keutamaan Aristoteles. *Ketiga*, membahas poin-poin relevansi dari etika keutamaan Aristoteles dalam upaya menampik praktik joki karya ilmiah. *Keempat*, mengemukakan upaya-upaya dalam menjaga moral keutamaan dalam dunia pendidikan Indonesia. *Kelima*, penutup.

II. Etika Keutamaan Menurut *Nicomachean Ethics* Aristoteles

Keutamaan dalam beberapa dasawarsa terakhir telah muncul kembali sebagai satu tema penting dalam etika. Seorang tokoh yang berjasa dalam upaya aktualisasi etika keutamaan, adalah Alasdair

4 Fransiskus Ceunfin, “Aristotle and Thomas Aquinas: Two Accounts of the Virtues”, *Jurnal Ledalero*, 12:2 (Ledalero: Januari 2013), hlm. 311-312.

5 Kata benda Yunani *hexis* berhubungan dengan kata kerja *echein* yang berarti “memiliki”. Kata “memiliki” di sini dilihat dalam arti intransitif atau refleksif, yaitu “memiliki diri untuk sesuatu yang lain”. Dalam *Metaphysics*, *hexis* ditegaskan sebagai suatu disposisi yang tetap dari suatu subjek yang membuat subjek itu selalu terarah kepada sesuatu yang baik atau buruk. Dalam *Categories*, *hexis* adalah kualitas yang menandai sesuatu secara tepat dan sulit berubah. Dalam *Physics*, *hexis* disebut sebagai satu keunggulan, suatu keadaan sempurna tanpa kekurangan apa pun. Fransiskus Ceunfin, “Etika Keutamaan dan Kualitas Hidup Moral”, *Jurnal Ledalero*, 1:1 (Ledalero: Januari 2002), hlm. 61-62.

MacIntyre melalui bukunya “*After Virtue*”. Bagi MacIntyre bahasa moral masa kini berada dalam “kerancuan yang parah”, sebagai akibat kegagalan proyek Pencerahan yang seakan telah meninggalkan fragmen-fragmen pandangan moral yang berantakan, tanpa adanya satu struktur konseptual yang menyatu.⁶

Pada awalnya, pandangan etika keutamaan digagas oleh Aristoteles dalam karyanya berjudul *Nicomachean Ethics*. Di dalamnya, Aristoteles memperlihatkan keutamaan sebagai *virtus* yang diturunkan dari kata *vid*, yang berarti kekuatan dalam berbagai bentuk. Namun, dalam arti sempit, *virtus* dimaknai sebagai kekuatan manusia yang memiliki kualitas tertentu, yang memungkinkan dirinya mampu melaksanakan karya-karya tertentu secara mulia dan terpuji.⁷

Etika keutamaan hadir dalam pandangan dan penilaian etisnya yang memusatkan perhatian pada pertanyaan “Manusia macam apakah aku harus menjadi? (*what kind of person should I be?*)”. Etika keutamaan menilai apakah pelaku itu sendiri baik atau buruk (*the ethics of being*).⁸ Etika keutamaan dibedakan dari etika kewajiban yang dipelopori oleh Immanuel Kant, yang menilai apakah suatu tindakan baik atau buruk, “Apa yang harus aku lakukan” (*the ethics of doing*).⁹ Fokus etika kewajiban adalah pada norma-norma bertingkah laku.¹⁰

Perspektif etika keutamaan memberi penekanan pada kualitas hidup atau watak pelaku (manusia, *being*). Etika keutamaan memiliki asumsi bahwa manusia senantiasa menjadi penentu bagi kehidupannya sendiri. Manusia memiliki akal (*rasio*), yang mampu mempertimbangkan tindakan yang dilakukannya: apakah baik atau buruk.¹¹ Bagi Aristoteles, manusia yang berkeutamaan adalah manusia yang mampu menghadirkan

6 A. MacIntyre, *After Virtue*, revised edition (London: Duckworth, 1985), hlm. 2.

7 Frans Ceunfin, “Etika” (Bahan Kuliah, STFK Ledalero, Maumere, 2019), hlm. 107.

8 K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 212.

9 Yosef Keladu Koten, *Partisipasi Politik* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2010), hlm 101.

10 J. Sudarminta, “Etika Keutamaan atau Etika Kewajiban”, *Basis*, XL (5 Mei, 1991), hlm. 164-165.

11 James Garvey, *20 Karya Filsafat Terbesar* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010), hlm. 25.

tindakan-tindakan kemanusiaanya dalam lingkup kehidupannya secara baik.¹²

Dalam *Nicomachean Ethics*, Aristoteles membagi teori keutamaannya ini, menjadi dua bagian. *Pertama*, keutamaan moral dan *kedua*, keutamaan intelektual.¹³

2.1 Keutamaan Moral

Dalam *Nicomachean Ethics*, keutamaan moral, menurut Aristoteles dibentuk oleh kebiasaan, *ethos*¹⁴, dan istilah etik. Dalam hal ini, Aristoteles sebetulnya mau menunjukkan bahwa keutamaan moral itu, bukan merupakan suatu hal yang terberi secara alamiah. Keutamaan moral dibentuk oleh *habitus*; oleh tindakan, latihan, yang dilakukan secara berulang-ulang. Untuk memiliki keutamaan moral secara sempurna, maka aspek latihan *habitus* ini, mesti digalakkan secara terus-menerus.¹⁵

Selain itu, hal penting lainnya untuk menjadi pribadi yang berkeutamaan, ialah bahwa orang tidak hanya sekadar pintar berteori tentang keutamaan itu, tetapi mesti mengaplikasikannya dalam hidup harian. Kualitas moral seseorang akan diukur, ketika sejauh mana ia mampu menghubungkan dan mengejawantahkan pengetahuan teoritis moralnya ke dalam ruang praksis hidup hariannya, di tengah ragam kelompok masyarakat.¹⁶

Adapun hal mendasar yang mesti diperhatikan dalam memiliki keutamaan moral, ialah dengan selalu menempatkan diri dalam posisi jalan tengah. Jalan tengah, bagi Aristoteles, memungkinkan seseorang untuk berada pada pilihan untuk bertindak secara tepat; bijaksana. Posisi pada jalan tengah, akan membantu seseorang untuk terhindar dari dua ekstrem yang membahayakan pegejawantahan tindakan kebajikannya.

12 *Ibid.*, hlm. 26.

13 Florida Sasi, "Kebajikan Intelektual: Fondasi Kebijaksanaan bagi Mahasiswa Milenial" *Jurnal Akademika*, 15:1 (Ledalero: Agustus – Desember 2019), hlm. 80.

14 K. Bertens, *op. cit.*, hlm. 224.

15 Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, penerj. Embun Kenyowati (Jakarta: Penerbit Teraju, 2004), hlm. 29.

16 Fredy Shebo, *Moral Samaritan* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2018), hlm. 3.

Dua ekstrem itu, yakni *exess* dan *defect*; terlalu banyak dan terlalu kurang.¹⁷ Orang yang berkeutamaan secara moral, memiliki nilai lebih, ketika ia mengaplikasikan tindakannya dalam praksis hidup hariannya. Ia akan secara matang menentukan tindakan mana yang mesti dibuat sesuai kebenaran dalam kehendaknya.¹⁸

2.2 Keutamaan Intelektual

Secara kodrati, manusia memiliki daya intelektual/akal budi, yang membedakannya dengan makhluk ciptaan yang lain (*animal rationale*). Daya intelektual ini, akan menentukan kiprah tindakan atau tingkah laku yang dihasilkan: apakah baik atau buruk/jahat.

Daya intelektual/akal budi manusia memiliki hukumnya tersendiri untuk menata kehendak, yang kemudian mengarahkan tingkah laku manusia.¹⁹ Hukum itu, dapat mengafirmasi dan menegaskan setiap keinginan untuk bertindak. Karena itu, menurut Aristoteles, untuk memiliki keutamaan intelektual, daya intelektual seseorang mesti selaras dengan tingkah laku/tindakan kebaikan yang menjadi objek dari akal budi.²⁰ Peran kehendak yang menghubungkan akal budi dan objek akal budi (kebaikan atau kejahatan) juga mesti menampakkan keselarasan itu. Selain itu, kemampuan untuk merefleksikan secara baik segala tingkah-laku yang dikehendaki, menjadi satu aspek penting yang mesti dijalankan untuk bertindak secara tepat.²¹

17 Yosef Keladu Koten, *op. cit.*, hlm. 110.

18 Florida Sasi, *op. cit.*, hlm. 81.

19 Immanuel Kant, *Kritik Atas Akal Budi Praktis*, penerj. Nurhadi M. A. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 99.

20 Yosef Keladu Koten, *op. cit.*, hlm.114.

21 Florida Sasi, *op. cit.*, hlm. 83.

III. Etika Keutamaan Aristoteles dalam Upaya Menampik Praktik Joki Karya Ilmiah

Berhadapan dengan praktik joki karya ilmiah di lingkungan pendidikan Indonesia, ada beberapa poin relevansi etika keutamaan Aristoteles yang bisa dikemukakan berikut ini. Poin-poin ini, sebetulnya ingin mempertegas pembentukan watak keutamaan, baik dalam diri para pendidik maupun peserta didik, guna menampik tawaran “serba instan” dari bisnis perjokian.

3.1 Pembiasaan Diri²²

Etika keutamaan Aristoteles sangat menekankan aspek kebiasaan (*habitus*) dalam upaya pembentukan watak atau karakter kepribadian seseorang untuk menjadi seorang yang berkeutamaan. Pembentukan watak/karakter ala Aristoteles ini, punya kaitan erat dengan kebijakan pemerintah Indonesia beberapa tahun silam, tentang perlunya penerapan pendidikan karakter di lingkungan pendidikan Indonesia. Pembentukan “karakter” (Yunani: *karasso*: cetak biru, format dasar, sidik seperti dalam sidik jari)²³ dalam sebuah proses pendidikan menjadi hal yang sangat penting, mengingat keberadaan dunia pendidikan merupakan wadah yang membentuk kepribadian seseorang yang nantinya akan hidup di tengah masyarakat.²⁴

Seperti halnya Aristoteles, karakter menurut Helen G. Douglas, karakter merupakan suatu hal yang tidak diwariskan, tetapi sesuatu yang dibangun secara berkesinambungan hari demi hari melalui pikiran dan perbuatan, pikiran demi pikiran, tindakan demi tindakan.²⁵ Karakter, jikalau mendapat penekanan yang kukuh dalam dunia pendidikan

22 Fransiskus Ceunfin, “Etika Keutamaan dan Kualitas Hidup Moral”, *op. cit.*, hlm. 64-65.

23 Doni Koesoema A., *Pendidikan Karakter: Utuh dan Menyeluruh*, edisi revisi (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015), hlm 55.

24 Agustinus Ryadi, “Pendidikan Karakter yang Kontekstual”, dalam *Rumah Filsafat.com*, <https://rumahfilsafat.com/2011/11/23/pendidikan-karakter-yang-kontekstual/>, diakses pada 2 Mei 2022.

25 *Ibid.*

di Indonesia, tentu akan memunculkan jati diri atau identitas bangsa Indonesia yang berkarakter. Sebab karakter setiap orang dalam suatu bangsa akan menjadi identitas bangsa itu sendiri.

Jikalau yang dilatih atau yang ditanamkan dalam lingkungan pendidikan ialah sikap instan dalam bisnis joki karya tulis, maka watak/karakter yang akan dimiliki ialah watak instan (jalan pintas pragmatis), seturut apa yang telah dibentuk dalam proses latihan-tindakan itu. Demikian juga sebaliknya, jikalau yang dibentuk dalam lingkungan pendidikan, merupakan sikap jujur dan asli, maka karakter yang akan dimiliki ialah kejujuran dan keaslian pula.

Karena itu, sangatlah penting untuk diperhatikan aspek kebiasaan ini. Kebiasaan yang dihidupi akan menentukan watak/karakter yang nantinya dimiliki, atau pun sebagaimana dalam bahasa R. J. Sullivan, “akan menjadi hukum bagi dirinya sendiri”²⁶.

3.2 Jalan Tengah²⁷

Tesis dasar Aristoteles tentang jalan tengah berbunyi: “hal-hal yang ekstrem harus di jauhi karena bersifat koruptif dan jalan tengah adalah yang terbaik”. Jalan tengah dalam pandangan Aristoteles ini bersifat aksiologis, yaitu berkaitan dengan nilai. Dalam arti bahwa jalan tengah merupakan puncak dari suatu cita-cita. Karena itu, norma jalan tengah menuntut orang melakukan hal yang terbaik yang bisa dicapai manusia dan bukan hanya mengejar pertengahan antara yang baik dan yang buruk.

Praktik joki karya ilmiah merupakan sebuah problem dalam dunia pendidikan dan sebagaimana hasil liputan tim investigatif Kompas, telah tumbuh secara masif. Di tengah problem ini, para pendidik dan peserta didik di dunia pendidikan mesti memiliki pemahaman yang baik akan jalan tengah. Para pendidik dan peserta didik mesti mampu bertindak “jujur” dalam menciptakan karyanya sendiri. Kejujuran ini mesti dihidupi

26 R. J. Sullivan, *Morality and the Good Life* (Memphis: Memphis University Press, 1977), hlm. 87.

27 Fransiskus Ceunfin, “Etika Keutamaan dan Kualitas Hidup Moral”, *op. cit.*, hlm. 65-66.

dan diperjuangkan secara maksimal. Jalan tengah keutamaan menolak sikap setengah-setengah (sikap minimalis). Jalan tengah menuntut orang untuk melakukan hanya hal yang baik dan bahkan hal yang paling baik.

3.3 Kehendak Bebas dan Tanggung Jawab²⁸

Tindakan yang ditampakkan dalam upaya menampik praktik joki karya ilmiah sebagai sebuah jalan instan, haruslah merupakan tindakan etis (*praxis*). *Praxis* menuntut agar tindakan yang dilakukan baik, di mana kesempurnaan intrinsik di dalam diri pelaku. Aktivitas ini menurut Aristoteles sifatnya transitif dan transitoris. Dengan pemahaman ini, sebagaimana juga dikatakan T. Engberg-Pederson²⁹, kita dapat menilik bahwa pelaku adalah pengasal dan penyebab tindakan-tindakan etis, tindakan etis untuk menampik praktik perjokian. Karena pelaku hadir sebagai pengasal dan penyebab, maka ia harus bertanggung jawab atas tindakannya.

Tindakan keutamaan adalah tindakan yang berdasarkan kesukarelaan (*voluntary*). Dalam tindakan yang sukarela, tindakan itu sendiri dan akibatnya dimaksudkan. Hal ini berbeda dengan tindakan yang tidak sukarela (*involuntary*), di mana baik tindakan maupun akibatnya tidak dimaksudkan. Tindakan yang sukarela dilakukan dengan kesadaran dan tanpa paksaan. Dalam tindakan yang sukarela, prinsip yang menggerakkan orang untuk bertindak ialah prinsip intrinsik dalam diri pelaku yang sadar akan keadaan-keadaan khusus tindakannya.

3.4 Pertimbangan dan Pilihan³⁰

Mewujudkan nilai keutamaan dalam dunia pendidikan dengan menampik praktik joki karya ilmiah, haruslah dilengkapi pula dengan pertimbangan dan pilihan yang baik. Pertimbangan adalah penalaran praktis yang selalu harus mendahului setiap tindakan etis dan karena

28 *Ibid.*, hlm. 66.

29 T. Engberg-Pederson, *Aristotle's Theory of Moral Insight* (Oxford: Clarendon Press, 1983), hlm. 240.

30 Fransiskus Ceunfin, "Etika Keutamaan dan Kualitas Hidup Moral", *op. cit.*, hlm. 67-68.

itu merupakan kondisi anteseden bagi keputusan etis (pilihan etis). Pertimbangan ini berkaitan dengan alternatif-alternatif dan hal-hal yang bisa berubah, dengan rencana-rencana yang dapat diperhitungkan dan dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan subjek.

Akhir dari proses pertimbangan ialah pilihan etis yang kemudian diejawantahkan dalam tindakan etis. Setiap tindakan selalu melibatkan pilihan yang sadar. Dari pilihan seseorang, orang lain akan tahu orang macam apa ia itu. Pada momen pilihan energi kehendak diperlihatkan. Jika kita menempatkan proses ini dalam bentuk silogisme, maka penalaran logisnya akan mengambil bentuk demikian. Premis mayor akan menegaskan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan hadir dalam akal budi yang membuat pertimbangan dalam bentuk universal. Premis minor berkaitan dengan sarana yang harus direfleksikan dan diperiksa oleh akal budi yang menentukan secara bebas. Karena itu, ia bersifat kontingen. Kesimpulan dari proses itu adalah tindakan.

Pilihan yang menentukan jalannya tindakan tidak selamanya baik. Ada juga pilihan yang buruk. Untuk itu, setiap pilihan harus senantiasa dilengkapi dengan penalaran yang runtut dan keinginan yang tepat. Keinginan mesti mendengarkan bisikan akal budi (kebijaksanaan praktis).

3.5 Kebijakanaksanaan Praktis (*Phronesis*)³¹

Upaya menampik praktik joki karya ilmiah, pada akhirnya mesti dilengkapi pula dengan kebijakanaksanaan praktis. Kebijakanaksanaan praktis adalah disposisi yang tepat dan dapat dipikirkan untuk bertindak dalam hubungan dengan hal-hal yang baik atau buruk bagi manusia. Dalam pengertian ini digarisbawahi dua hal. *Pertama*, objek kebijakanaksanaan praktis adalah tindakan (baik atau buruk). *Kedua*, kebijakanaksanaan praktis adalah suatu aktivitas logis. Objek kebijakanaksanaan praktis adalah apa yang baik bagi manusia sebagai manusia. Kebaikan adalah tujuan kodrati manusia. Tujuan ini dicapai melalui tindakan. Tindakan adalah objek pemikiran dan keinginan. Untuk bertindak baik orang harus mengetahui objeknya

31 *Ibid.*, hlm. 68-69.

dan menginginkannya secara tepat. Kebijakan praktis membantu kita untuk menginginkan sesuatu dengan tepat. Suatu tindakan baik, jika kebijakan praktis dan keutamaan etis berpadu dalam objek yang sama yang ditegaskan atau disangkal oleh kebijakan praktis dan dikejar atau dihindari oleh keutamaan etis. Perpaduan antara pemikiran dan keinginan berakhir dalam pilihan dan melalui pilihan bermuara dalam tindakan.

Proses (struktur) penalaran melalui kebijakan praktis ini mirip dengan proses penalaran logis formal (struktur silogisme formal). Karena itu, proses ini sering juga disebut silogisme praktis. Premis mayor memuat konsep umum tentang tujuan yang hendak dicapai. Premis minor mengungkapkan hal-hal khusus yang dapat dipahami dalam persepsi. Kesimpulan mengungkapkan pilihan yang berakhir dalam tindakan.

Satu sifat penting dari kebijakan praktis adalah memerintahkan. Ia mewajibkan apa yang harus dilakukan atau dihindari. Perintah ini dilandasi pertimbangan rasional dan merujuk pada harmoni batin, serta berakar dalam integritas moral.

IV. Mempertimbangkan Etika Keutamaan, Menjaga Muruah Pendidikan di Indonesia

Catatan tim investigasi *Kompas* tentang maraknya praktik joki karya ilmiah telah membuka mata publik, bahwa realitas pendidikan di Indonesia mesti perlu dibenahi secara terus-menerus. Sistem pendidikan boleh berjalan makmur dari waktu ke waktu, tetapi jikalau pribadi-pribadi yang menetap di dalamnya, terus-menerus berkiperah dalam praktik yang tak senonoh, tentu buah dari proses pendidikan yang dijalankan akan dangkal sifatnya: semata-mata hanya menegaskan soal prosedural.

Praktik perjokian, sebagaimana sebut Hyronimus Rhiti, merupakan salah satu rangkaian penyakit patologis “ilmiah”, di samping budaya plagiarisme, yang juga masih sulit diberantas. Praktik perjokian telah mengkhianati, merusak, membohongi, profesionalitas, dan purifikasi ilmiah, yang kemudian bisa bermuara pada keterasingan dunia pendidikan

dari masyarakat yang waras.³² Akan menjadi semakin berbahaya, jikalau maksiat di dunia pendidikan ini menjadi sebuah *habitus* dan dianggap sekadar tren akademik. *Habitus* ini kemudian memunculkan watak/karakter dan pada akhirnya menampakkan sebuah budaya kejahatan akademik yang dianggap waras, biasa, dan wajar.

Di tengah problem perjokian ini, hemat penulis ada dua hal yang bisa dikemukakan. *Pertama*, perlu adanya tanggung jawab bersama dalam merawat keutamaan dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan bagi *founding fathers*, merupakan salah satu investasi-modal manusia Indonesia ke depannya. Apa yang dididik dan tercipta dalam dunia pendidikan hari ini, akan membentuk dan menentukan realitas bangsa Indonesia di kemudian hari.³³

Adapun tanggung jawab yang bisa dijalankan dalam menjaga muruah pendidikan di Indonesia, sebagai ladang pembentuk kaum intelektual, ialah *pertama*, bagi pihak pemerintah dan para penanggung jawab instansi-instansi pendidikan, mesti memperjelas spesifikasi aturan yang melarang kecurangan berbasis joki.³⁴ Dalam telaah tim investigasi *Kompas*, salah satu akar problem perjokian di dunia pendidikan, ialah tidak ada kejelasan terkait aturan ini. Karena ketidakjelasan aturan ini, para penyedia jasa joki merasa sah-sah saja untuk menjalankan bisnis joki mereka tersebut. Bahkan beberapa penyedia jasa joki, mengaku punya basis hukum dalam menjalankan bisnisnya.

Selama ini, istilah terdekat yang digunakan dalam beberapa peraturan menteri, ialah “plagiarisme”, yang diartikan sebagai pengakuan karya orang lain sebagai karya sendiri. Namun, sebetulnya “plagiarisme” dan “joki” merupakan dua konsep yang berbeda. Dalam kasus plagiarisme tidak ada kesepakatan transaksi jasa dan uang antara kedua belah pihak. “Joki” bisa masuk dalam kasus plagiarisme, jikalau seorang penyedia jasa joki mengolah kembali karyanya untuk berbagai klien/pengguna jasa joki yang berbeda.

32 Hyronimus Rhiti, *loc. cit.*

33 Sukidi, “Soekarno-Hatta dan Indonesia Hari Ini”, *Kompas*, 9 Februari 2023, hlm. 1.

34 Haekal Al Asyari, *loc. cit.*

Hal kedua, yang dibisa digalakan ialah penguatan layanan konseling di lingkungan internal institusi pendidikan.³⁵ Layanan konseling mesti menyorot pula aspek psikologis para pendidik dan peserta didik di lingkungan institusi pendidikan, yang kadang mengalami “kegelisahan akademik” akibat banyaknya tuntutan atau tugas akademik yang mesti dipenuhi. Kegelisahan akademik para pendidik dan peserta didik, kadang membuat mereka mengabaikan keutamaan moral akademik dan kemudian mengambil jalan pintas dalam bisnis joki, guna memuluskan beban akademik mereka.

Institusi pendidikan juga dapat membuat suatu sistem laporan pelanggaran (*whistleblowing system*) untuk mengidentifikasi problem kecurangan, praktik joki tersebut. Selain itu, penting pula bagi lingkungan pendidikan di Indonesia untuk mempertimbangkan lebih banyak metrik pengukuran capaian peserta didik khususnya, serta mengeksplorasi ragam metode yang bisa mengevaluasi pemahaman mereka terkait suatu topik, semisal menjalankan ujian presentasi (*oral exam*).

Hal kedua yang mesti dilirik pula dalam upaya perwujudan etika keutamaan tersebut, ialah bahwa problem joki karya ilmiah merupakan efek dari sistem ideologi (visi dan perspektif) pendidikan di Indonesia yang terlalu berorientasi pada prinsip kesuksesan dan kebanggaan individual. Dunia pendidikan Indonesia memiliki banyak tuntutan akademik yang mengharuskan pendidik dan peserta didik untuk memenuhinya, guna memperoleh prestasi yang baik. Upaya mendapatkan prestasi ini, sering berjalan dalam arus moral akademik yang tak senonoh, semisal melalui jalur joki karya ilmiah. Dalam bahasa Michael Sandel, model pendidikan seperti ini merupakan wujud nyata dari “tirani meritokrasi”. Tirani meritokrasi menggambarkan sebuah sistem kehidupan yang dibelenggu oleh ideologi kesuksesan individual, pemujaan gelar dan ijazah, sekaligus pelecehan terhadap mereka yang tak bergelar dan berijazah.³⁶

35 *Ibid.*

36 Peter Tan, “Meritokrasi, Reproduksi Ketimpangan, dan Dosa Akademisi: Perspektif Michael Sandel” (Bahan Webinar KMK dan Diskusi Filsafat Ledalero, Senin, 6 Maret 2023), hlm. 1.

Pemahaman dan upaya pengejawantahan etika keutamaan dalam dunia pendidikan di Indonesia, sekurang-kurangnya mau mengkritisi sistem pendidikan di Indonesia yang punya gaung meritokrasi tersebut. Pendidikan di Indonesia haruslah menghantar setiap individu untuk memiliki watak atau karakter yang berkeutamaan. Dalam keutamaan, seorang individu memiliki kebijaksanaan praktisnya untuk mampu bertindak secara tepat. Dalam ketepatan itu, ia mampu membedakan mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang buruk, yang tak sesuai dengan moral akademik.

V. Kesimpulan

Praktik perjokian karya ilmiah merupakan sebuah problem yang telah memermalukan dunia pendidikan Indonesia, sebagai penjaga keutamaan moral akademik, dalam membangun masa depan bangsa. Praktik ini memang belum memiliki spesifikasi hukum yang melarangnya. Namun, sebagai kaum intelektual yang tengah berproses atau pun bertindak sebagai guru di dunia pendidikan, upaya untuk menjaga keutamaan muruah diri dan institusi pendidikan, menjadi hal yang mesti diperjuangkan dari waktu ke waktu.

Untuk menanamkan etika keutamaan ini, dibutuhkan kebijaksanaan praktis dalam diri setiap individu di dunia pendidikan. Pandangan mendasarnya bahwa mereka yang bijaksana dalam pendidikan, ialah mereka yang mampu berani untuk menentukan tindakannya di tengah banyaknya problem yang menghalangi pertumbuhan pendidikan di Indonesia, semisal praktik perjokian ini.

Daftar Pustaka

- A., Doni Koesoema. *Pendidikan Karakter: Utuh dan Menyeluruh*. Edisi revisi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015.
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. Penerj. Embun Kenyowati. Jakarta: Penerbit Teraju, 2004.

- Asyari, Haekal Al. “Maraknya ‘Joki’ di Dunia Pendidikan Mengancam Integritas Akademik Mahasiswa Indonesia”. *The Conversation* <<https://theconversation.com/maraknya-joki-di-dunia-pendidikan-mengancam-integritas-akademik-mahasiswa-indonesia>>, diakses pada 5 Februari 2023.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Ceunfin, Frans.”Etika”. Bahan Kuliah, STFK Ledalero, Maumere, 2019
- Ceunfin, Fransiskus. “Aristotle and Thomas Aquinas: Two Accounts of the Virtues”. *Jurnal Ledalero*, 12:2, Januari 2013.
- ”. “Etika Keutamaan dan Kualitas Hidup Moral”. *Jurnal Ledalero*, 1:1, Januari 2002.
- Engberg-Pederson, T. *Aristotle’s Theory of Moral Insight*. Oxford: Clarendon Press, 1983.
- Garvey, James. *20 Karya Filsafat Terbesar*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.
- Kant, Immanuel. *Kritik Atas Akal Budi Praktis*. Penerj. Nurhadi M. A. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Koten, Yosef Keladu. *Partisipasi Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.
- MacIntyre, A. *After Virtue*. Revised edition. London: Duckworth, 1985.
- Rhiti, Hyronimus. “Perjokian, antara Beban dan Status”. *Kompas*, 14 Februari 2023.
- Ryadi, Agustinus, “Pendidikan Karakter yang Kontekstual”. *Rumah Filsafat.com*. <<https://rumahfilsafat.com/2011/11/23/pendidikan-karakter-yang-kontekstual/>>, diakses pada 2 Mei 2022.
- Sasi, Florida. “Kebijakan Intelektual: Fondasi Kebijakan untuk Mahasiswa Milenial”. *Jurnal Akademika*, 15:1, Agustus – Desember 2019.
- Shebo, Fredy. *Moral Samaritan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2018.
- Sudarminta, J. “Etika Keutamaan atau Etika Kewajiban”. *Basis*, XL/5 Mei 1991.
- Sukidi. “Soekarno-Hatta dan Indonesia Hari Ini”. *Kompas*, 9 Februari 2023.
- Sullivan, R. J. *Morality and the Good Life*. Memphis: Memphis University Press, 1977.

- Tan, Peter. “Meritokrasi, Reproduksi Ketimpangan, dan Dosa Akademisi: Perspektif Michael Sandel”. Bahan Webinar KMK dan Diskusi Filsafat Ledalero, Senin, 6 Maret 2023.
- Tim Investigasi Harian Kompas. “Usaha Perjokian Merajalela Bagai Pabrik-Karya Ilmiah, Perjokian Tergoda Jalan Pintas Gadaikan Integritas, Kepakaran Diperjualbelikan Bebas, Fenomena Buruk yang Diabaikan, dan Karya Joki Sulit Diidentifikasi”. *Kompas*, 11 Februari 2023.